



Proyek Jalan di Sulsel Dibatalkan

Proyek Jalan di Sulsel Dibatalkan

DAK Fisik

Rp87,153 miliar

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi hingga perbaikan sekolah

Dampak pemangkasan

- Pengerjaan ruas jalan Solo-Paneki-Kulampu di Wajo
- Anggaran: Rp18 miliar
- Pembangunan ruas jalan Ussu-Nuha di Luwu Timur
- Anggaran: Rp3 miliar

BATAL DIKERJAKAN TAHUN INI



● Akibat Pemangkasan Anggaran dari Presiden Prabowo Subianto ● Pejabat Pemprov Sulsel Diimbau Kurangi Perjalanan Dinas

MAKASSAR, TRIBUN - Kebijakan pemangkasan anggaran dana transfer pusat ke daerah, berdampak pada pembangunan infrastruktur di Sulsel. Salah satunya adalah, pengerjaan dua ruas jalan di Wajo dan Luwu Timur, batal setelah anggarannya dihapus.

Salah satu sumber dana yang dipangkas adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Jumlahnya sebesar Rp87,153 miliar. DAK fisik menjadi sumber dana yang digunakan Pemprov Sulsel untuk melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur. Di antaranya jalan, irigasi, hingga perbaikan sekolah.

■ ke halaman 7

Dana Transfer ke Sulsel

Sebelum	Pemangkasan	Setelah
Rp 4,9 triliun	Dana Transfer	Rp4,7 triliun
Rp3,280 triliun	Alokasi DAU	Rp3,226 triliun
	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Rp306 miliar
Rp1,615 triliun	Dana Umum	Rp2,919 triliun
	DAK Fisik	Rp1,528 triliun
	Non-Fisik	Rp1,42 miliar
Rp30,573 miliar	Insentif	Rp30,573 miliar

Akibat pemangkasan ini, rencana pengerjaan ruas jalan di Solo-Paneki-Kulampu di Kabupaten Wajo, batal terlaksana tahun ini.

Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Astina Abbas, pengerjaan ruas jalan ini sebelumnya dipilih oleh pusat untuk dikerjakan. Namun karena ada kebijakan efisiensi, ruas jalan itu batal dikerjakan.

"Kalau tidak salah anggarannya Rp18 miliar. Karena ada efisiensi, pembangunannya batal dilakukan," kata Astina, Rabu (13/2).

Ada satu ruas lainnya yang batal dikerjakan. Namun sumbernya bukan dari DAK pusat.

Ruas tersebut yakni Ussu - Nuha di Luwu Timur.

Sumber dana pengerjaannya ruas jalan ini menggunakan Dana Hibah Sawit dari pemerintah pusat.

Hanya saja dengan efisiensi anggaran pusat, maka hibah tersebut terkena dampak pemangkasan.

"Hibah sawit juga itu lanjutannya Ussu - Nuha Rp3 miliar, masuk efisiensi juga," jelas Astina.

Pemerintah pusat sudah menetapkan pemotongan anggaran transfer. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah terbit.

Isinya terkait pemangkasan anggaran men-

cakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

Dana Transfer ke Sulsel semula Rp 4,9 triliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan Rp 3,280 triliun untuk DAK

Kemudian Rp 1,615 triliun untuk DAK. Sementara insentif di angka Rp 30,573 miliar

Dengan pemotongan anggaran dana transfer, maka alokasi Pemprov Sulsel menyusut menjadi Rp4,7 triliun.

Adapun untuk DAK dialokasikan Rp 3,226 triliun. Lalu Rp1,528 triliun untuk DAK serta angka insentif tetap Rp 30,573 miliar.

Artinya ada pemangkasan DAK sebesar Rp 25,061 miliar serta DAK sebesar Rp 87,153 miliar.

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadry menyebut penyesuaian anggaran sudah berlaku di Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah.

"Ya dari DAK dan DAK semuanya seperti itu, di Kementerian dan lembaga juga. Termasuk di kabupaten/kota," kata Prof Fadry usai Rapat Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

Dengan pemotongan

anggaran ini, akan ada penyesuaian target pemerintahan.

"Semua program arahan presiden akan dijalankan cuma memang akan ada penyesuaian target," lanjutnya.

Lebih rinci, anggaran DAU Rp 3,226 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 306 miliar.

Sementara dana umum sebesar Rp 2,919 triliun.

Untuk anggaran DAK Rp 1,528 triliun, terbagi lagi menjadi dua alokasi.

DAK Fisik mendapat porsi Rp 142 miliar dan DAK non fisik Rp 1,386 triliun.

Kurangi

Perjalanan Dinas

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadry Djufry sudah mengingatkan pejabat Pemprov Sulsel untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran.

Terutama anggaran perjalanan dinas atau kegiatan yang sifatnya tidak mendesak.

Prof Fadry meminta para pejabatnya tidak melakukan perjalanan dinas jika tidak mendesak.

"Perjalanan yang output tidak jelas tidak ada dicapai tidak usah. Menghadiri kegiatan yang tidak urgent tidak usah. Kalau bisa pertemuan virtual, ya virtual aja," kata Prof Fadry Djufry saat diwawancarai Tribun-Ti-

mur.com di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

"Kecuali ada pertemuan yang urgent harus ketemu ya tidak masalah," lanjutnya.

Instruksi ini disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel.

Prof Fadry meminta kepala dinas tak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan menggunakan APBD untuk pelantikan tersebut.

Lagipula, hanya jabatan Gubernur yang diundang menghadiri pelantikan tersebut. Jabatan kepala dinas tidak diundang.

Meski begitu, Prof Fadry masih memaklumi pejabat yang ingin berangkat dengan menggunakan anggaran pribadi.

"Lalau ada misalnya mungkin karena keluar-ganya mau pergi dengan biasa sendiri silahkan. Tapi tidak gunakan APBN dan APBD. Misalkan saudaranya bupati, ya mungkin saja pergi tapi tidak gunakan APBD," lanjutnya.

"Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN harus samina wa atho'na. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan," tegas Prof Fadry Djufry. (qih)